



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 547/KEP/HK/2025

TENTANG

INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Inovasi Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Inovasi Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 547/KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Desember 2025
TENTANG INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
1	2	3	4	5
1	DP3AP2KB <i>Goes To School</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan inovasi “ <i>Goes to School</i> ” sebagai upaya sistematis untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Inovasi ini berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan formal. Sekolah, sebagai ruang belajar dan pengembangan karakter anak, seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun pada kenyataannya, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, baik dilakukan oleh teman sebaya, guru, maupun pihak luar yang memiliki akses ke lingkungan sekolah. Sehingga Inovasi ini dirancang sebagai pendekatan	Untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas warga sekolah terutama guru, siswa, dan orang tua dalam mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Membangun sistem perlindungan anak yang berbasis sekolah melalui edukasi langsung, pembentukan Agen Pelindung Anak, serta mekanisme pelaporan yang ramah anak. Mendorong partisipasi aktif anak sebagai pelopor dan pelapor, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti OPD terkait, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga layanan.	a. bagi sekolah, inovasi ini meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam mengenali serta menangani kasus kekerasan secara tepat; b. siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-haknya dan memiliki keberanian untuk berbicara melalui peran sebagai Agen Pelindung Anak; c. orang tua menjadi lebih sadar akan pentingnya pola asuh tanpa kekerasan; d. bagi pemerintah daerah, memperkuat sistem perlindungan anak berbasis data dan kolaboratif, serta membantu pencapaian indikator pembangunan daerah dalam bidang perlindungan anak; dan e. secara keseluruhan, inovasi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, ramah anak, serta membentuk jejaring perlindungan yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		pengecehan berbasis sekolah dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.		kabupaten/kota lain di Provinsi NTT.
2	GERHANA (Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak)	Hak Sipil Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara khusus dimiliki oleh anak-anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas yang diakui oleh Negara. Hak Identitas Anak ini tertuang dalam produk Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pemenuhan akan kepemilikan identitas anak dibutuhkan dalam upaya untuk mengakses layanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau perlindungan hukum. Dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.	Memperkuat pelayanan dan fasilitasi lintas sektor dalam memenuhi hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).	<ul style="list-style-type: none"> a. advokasi peningkatan akses anak terhadap Layanan Dasar. anak yang memiliki identitas hukum dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan program bantuan sosial pemerintah. b. percepatan Capaian Target Nasional, Mendukung pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran dan KIA sesuai RPJMN 2025–2029 serta target pelayanan administrasi kependudukan; c. penguatan Sistem Perlindungan Anak, identitas hukum menjadi dasar perlindungan anak dari risiko penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan anak; d. pemberdayaan Kader dan Masyarakat Lokal, melibatkan kader desa, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam edukasi dan layanan langsung ke masyarakat, sehingga membangun kesadaran kolektif; dan e. mengurangi Kesenjangan Wilayah Terpencil, GERHANA menjangkau wilayah dengan cakupan rendah, membantu anak-anak di daerah terpencil untuk tercatat dan terlindungi.
3	Inovasi Layanan Publik "COACHING CORNER PUG"	Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedianya sistem layanan konsultasi, pendampingan dan fasilitasi PUG PPRG; dan b. percepatan Implementasi Penganggaran, Perencanaan Responsif Gender (PPRG) untuk 	Pemahaman OPD dalam penyusunan RKA dengan menggunakan analisis GAP, GBS

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		<p>Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dengan upaya menggerakkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan PUG pada perencanaan penganggarnya, agar terwujudnya PPRG dengan memperhatikan setiap usulan kegiatan (minimal 1 kegiatan) dari setiap (PD) harus melampirkan instrument analisis gender yakni <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP). Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan menggunakan instrumen <i>Gender Analys Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS), namun sejauh ini hasilnya masih jauh dari harapan karena belum ada komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakannya. Disamping itu menyelaraskan pemahaman terkait PUG kepada semua ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT, memfasilitasi dan pendampingan bagi perangkat Daerah dalam penyusunan GAP GBS. Selanjutnya hasil yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan/TOR. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Hal ini dimaksudkan sebagai</p>	41 PD Lingkup Pemprov. NTT	

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender untuk itulah pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT		
4	Batogor Sapa UMKM	<p>BATOGOR SAPA UMKM didesain untuk menjadi platform yang sangat terintegrasi, memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI). Integrasi ini akan dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota hingga lembaga-lembaga penting lainnya. Dengan adanya integrasi, platform ini diharapkan mampu memberikan layanan yang komprehensif dan terpadu. Ini termasuk mempermudah akses UMKM terhadap permodalan, perizinan, dan program-program pemerintah lainnya.</p> <p>Salah satu fungsi utama BATOGOR SAPA UMKM adalah membantu pemerintah mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi UMKM, terutama terkait perizinan dan sertifikasi produk. Platform ini akan secara otomatis mengarahkan UMKM untuk mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui lembaga terkait. Hal serupa juga berlaku untuk sertifikasi halal dan izin edar dari BPOM.</p> <p>Sistem BATOGOR SAPA UMKM akan memetakan, memverifikasi, dan mendorong UMKM untuk mendapatkan</p>	<p>a. tersedianya databade UMKM lengkap dengan pemetaan keberadaan UMKM binaan Perempuan; dan</p> <p>b. pemberian pendampingan bagi UMKM binaan Perempuan untuk pemenuhan administrasi dan perijinan</p>	<p>a. tersedianya pusat informasi yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, penyedia modal, Masyarakat, dan dinas atau lembaga terkait;</p> <p>b. meningkatkan pengenalan produk unggulan UMKM binaan perempuan;</p> <p>c. memperluas dan memudahkan akses pasar bagi pelaku UMKM perempuan;</p> <p>d. mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan;</p> <p>e. mebagai sarana promosi melalui digitalisasi produk-produk unggulan UMKM agar mudah diakses oleh masyarakat; dan</p> <p>f. meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui UMKM binaan perempuan</p>

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		sertifikasi yang diperlukan. Sebagai contoh, UMKM mikro akan didorong untuk memperoleh sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu menyelenggarakan sistem jaminan produk halal di Indonesia, termasuk mengatur, mendaftarkan, dan menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang beredar.		
5	Inovasi Perlindungan Perempuan melalui Riset (PPmR): "Budaya Kawin Tangkap dalam Perspektif Intervensi Sunrise Model di Sumba - Nusa Tenggara Timur"	Kawin tangkap adalah praktik tradisional di Pulau Sumba yang menuai pro dan kontra. Meski sebagian Masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari adat, praktik ini sering kali melanggar hak asasi perempuan, menyebabkan trauma psikologis dan mengabaikan prinsip persetujuan dalam pernikahan. Maka diperlukan pendekatan inovatif berbasis riset untuk melindungi perempuan dari praktik ini sambil tetap menghormati konteks budaya lokal. Tujuan dari inovasi ini Adalah menyusun model perlindungan perempuan berbasis adat dan hukum positif, memberikan edukasi berbasis budaya kepada masyarakat mengenai hak Perempuan, mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis komunitas, mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan tokoh adat dan pemuda.	a. menurunkan jumlah kasus kawin tangkap terlapor; b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak perempuan; c. menerbitkan produk hukum lokal yang berpihak pada perempuan; dan d. membentuk jejaring pelindung perempuan di akar rumput.	a. perlindungan hak kerempuan; b. membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami bahwa kawin tangkap meskipun dianggap tradisi bisa melanggar hak asasi perempuan; dan c. mengedukasi masyarakat bahwa budaya dapat dievaluasi dan dikaji ulang dalam kerangka etika dan keadilan gender.
6	Peduli Lansia	Lansia merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara fisik, sosial, dan emosional. Seiring dengan bertambahnya usia, banyak lansia yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan dasar serta mengalami kesepian karena minimnya interaksi sosial. Menjawab	Meningkatkan Kesehatan Mental dan Psikologis Lansia Dengan memberikan kesempatan untuk bercerita dan didengarkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan kesejahteraan	a. meningkatkan kesejahteraan emosional: berbagi cerita dan pengalaman dengan lansia dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional mereka dan mengurangi rasa kesepian; b. menghargai pengalaman hidup: lansia memiliki banyak pengalaman hidup yang

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		<p>tantangan tersebut, kami menginisiasi inovasi "Peduli Lansia", sebuah program yang menggabungkan pendekatan kemanusiaan, pemberdayaan, dan pelayanan terpadu berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Inovasi ini dirancang karena melihat jumlah lansia di Kota Kupang yang semakin tinggi dan kurangnya perhatian lingkungan terhadap Lansia. Berdasarkan data dari BPS Statistik Per tahun 2023, sebanyak 38. 557 di Kota Kupang merupakan masyarakat lansia yang berumur di atas 60 tahun. Hal ini berarti sekitar 7% dari populasi Masyarakat yang berada di Kota Kupang adalah lansia. Kegiatan "Peduli Lansia" adalah Kunjungan ke rumah-rumah lansia secara rutin, dengan pemberian vitamin. Dalam kunjungan itu, nantinya akan diadakan pemeriksaan kesehatan ringan oleh tenaga medis, ruang interaksi sosial melalui kegiatan kreatif dan spiritual. Kunjungan ini nantinya akan sekaligus menjadi pendataan untuk lansia rentan sebagai dasar intervensi lanjutan nantinya.</p>	<p>psikologis lansia.</p>	<p>berharga, dan berbagi cerita dengan mereka dapat membantu menghargai pengalaman hidup tersebut;</p> <p>c. menghargai pengalaman hidup: lansia memiliki banyak pengalaman hidup yang berharga, dan berbagi cerita dengan mereka dapat membantu menghargai pengalaman hidup tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebut; <p>d. meningkatkan koneksi sosial: berbagi dengan lansia dapat membantu meningkatkan koneksi sosial mereka dan mengurangi rasa isolasi;</p> <p>e. meningkatkan kualitas hidup: berbagi dengan lansia dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan membuat mereka merasa lebih bahagia dan puas;</p> <p>f. menghormati dan menghargai: berbagi dengan lansia dapat membantu menghormati dan menghargai mereka sebagai individu yang berharga dan memiliki pengalaman hidup yang unik.</p>

No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
7	NUSA CARE (<i>Nurturing Staff Care</i>)	Kesehatan dan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan birokrasi yang produktif, efisien, dan responsif. Namun dalam praktiknya, kesibukan kerja dan minimnya kesadaran terhadap pencegahan dini sering menyebabkan terabaikannya aspek kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk itu, NUSA CARE (<i>Nurturing Staff Care</i>) sebagai pendekatan integratif yang menyeimbangkan aspek kesehatan fisik dan mental ASN melalui kegiatan preventif yang menyenangkan dan mudah diterapkan. Berfokus pada dua komponen utama, yaitu senam bersama secara rutin dan pemeriksaan kesehatan sederhana setiap bulan. Senam dilakukan dua kali dalam seminggu dengan instruktur kebugaran, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh (BMI), dan kadar gula darah sewaktu. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor sebelum jam kerja dimulai, agar tidak mengganggu jam kerja dan memberikan efek psikologis positif sejak pagi hari.	Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aktif, dan produktif bagi ASN	a. meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya kesehatan; b. deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM); c. meningkatkan kebugaran jasmani dan daya tahan tubuh; dan d. menumbuhkan semangat kerja dan lingkungan kerja yang positif.
8	K3 Ceria	Sebagai instansi pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab	a. pelaksanaan kegiatan di dinas sesuai dengan prinsip K3 Perkantoran ; b. meningkatkan keselamatan kerja melalui sistem pencegahan risiko di ruang kantor; c. menjamin kesehatan pegawai dengan fasilitas pendukung dan	a. pegawai merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja; b. produktivitas meningkat karena berkurangnya risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan; c. terbangun budaya kerja yang sehat, inklusif, dan berintegritas; dan d. dinas menjadi role model penerapan K3


No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
		untuk memenuhi kesejahteraan pegawai. Penerapan K3 perkantoran menjadi inovasi strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan mendukung kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak pegawai.	edukasi berkelanjutan; d. mewujudkan lingkungan kerja inklusif yang ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas; dan e. mendukung efisiensi kerja dengan tata ruang dan prosedur kerja yang ergonomis.	perkantoran di lingkup pemerintah daerah NTT.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001